

## ABSTRAK

Prabawati Oktaviana, 1218030150, 2025, Kegagalan Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Pendirian Gereja di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)

Pendirian rumah ibadah menjadi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Namun hal tersebut dapat menjadi pemicu adanya konflik di masyarakat. Terutama apabila pendirian rumah agama tersebut berasal dari kaum minoritas dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kegagalan pendirian rumah ibadah di Desa Muara Bahan, dengan fokus pada tiga aspek utama: faktor-faktor yang memicu konflik dalam proses pendirian gereja, dinamika konflik antara berbagai aktor yang terlibat dalam pendirian gereja, serta resolusi konflik dalam proses pendirian gereja.

Penelitian ini menggunakan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf yang memandang konflik sebagai akibat dari adanya ketidak seimbangan kekuasaan struktural. Dimana terdapat kelompok yang berkuasa (*Dominat Group*) dan kelompok yang diperintah (*Subordinate Group*). Dan bagaimana resolusi atau penyelesaian konflik yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi pustaka. Informan terdiri dari tokoh agama, pihak pemerintah desa, masyarakat beragama Kristen dan masyarakat beragama Islam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor pemicu konflik dalam pendirian gereja di Desa Muara Bahan antara lain adalah tidak adanya komunikasi resmi dari umat Kristen kepada pemerintah desa dan masyarakat sekitar, kekhawatiran mayoritas Muslim terhadap upaya Kristenisasi melalui pendekatan sosial, dominasi sosial kelompok mayoritas dalam menentukan simbol keagamaan yang hadir di ruang publik, terdapat kelompok subordinat yang merupakan masyarakat yang beragama Kristen, serta ketiadaan ruang dialog lintas umat beragama. Dinamika konflik menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Resolusi konflik tidak dilakukan secara formal maupun substansial. Tidak ada musyawarah, mediasi antarumat, atau evaluasi terbuka yang melibatkan semua pihak

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik pendirian gereja tidak semata-mata persoalan keagamaan, melainkan berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan dan pengelolaan perbedaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, dialog lintas agama yang intensif, serta peran aktif negara dalam menjamin kebebasan beragama secara adil dan setara.

**Kata kunci:** konflik agama, pendirian gereja, teori konflik sosial, resolusi konflik, Ralf Dahrendorf.